



Analisis Kesiapsiagaan *Stakeholder* terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur

Dean Jundri Hatta^{1*}, Hasrul Hadi¹, Baiq Ahda Razula Apriyeni¹

¹ Program Studi Pendidikan Geografi, Universitas Hamzanwadi, Indonesia

DOI: <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3239>

Article Info:

Received : 18 Juli 2026
Revised : 12 Agustus 2026
Accepted : 19 Agustus 2026
Published : 22 September 2026

Correspondence:

Dean Jundri Hatta

Phone:

Abstract: Sembalun Bumbung Village, Sembalun Subdistrict, East Lombok Regency, is located in a hilly area around Mount Rinjani that has tourism and agricultural potential, but is also vulnerable to landslide disasters. Slope conditions, rainfall, land use, as well as community capacity and local institutions are factors related to disaster preparedness. This study aims to analyze the preparedness of *Stakeholders*, including the Sembalun Bumbung Village Government, the Village Disaster Preparedness Team (TSBD), affected residents, and the Regional Disaster Management Agency (BPBD) of East Lombok Regency, as well as to identify supporting factors, obstacles, and recommendations for improving preparedness. This study uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques in the form of in-depth interviews, field observations, and documentation. Informants were selected through purposive sampling and the data were analyzed using the interactive model of Miles and Huberman. The results of the study show that *Stakeholder* preparedness is relatively good in the institutional and emergency response aspects, supported by the existence of TSBD, SOPs, training, equipment, and coordination among *Stakeholders*. However, there are still obstacles such as the unavailability of a formal early warning system, communication disruptions, limited volunteers and transportation, minimal lighting, and limited budget for training and simulations. Strengthening village policies, periodic training, early warning facilities, reforestation, and TSBD capacity are needed to improve preparedness.

Keywords: Disaster Preparedness; Landslide; *Stakeholder*; TSBD; Sembalun Bumbung

Citation: Hatta, D. J., Hadi, H., & Apriyeni, B. A. R. (2026). Analisis Kesiapsiagaan *Stakeholder* terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Sembalun Bumbung Kecamatan Sembalun Kabupaten Lombok Timur. *Jurnal Pendidikan, Sains, Geologi, Dan Geofisika (GeoScienceEd Journal)*, 7(4), 5653–5659. <https://doi.org/10.29303/goescienceed.v7i4.3239>

Pendahuluan

Indonesia merupakan negara dengan tingkat risiko bencana yang tinggi karena memiliki kondisi geografis, geologis, dan klimatologis yang kompleks. Salah satu ancaman bencana yang banyak terjadi adalah bencana hidrometeorologi, termasuk tanah longsor, terutama pada wilayah berbukit dengan kemiringan lereng tinggi, intensitas hujan yang tinggi, serta wilayah yang mengalami perubahan tata guna lahan. Tanah longsor merupakan perpindahan massa tanah, batuan, atau material lereng akibat gaya gravitasi yang dipengaruhi oleh berbagai faktor pemicu, seperti hujan,

getaran, kondisi tanah, kemiringan lereng, dan aktivitas manusia (McColl, 2022). Dalam konteks perubahan iklim, peningkatan kejadian hujan ekstrem dapat memperbesar kemungkinan terjadinya tanah longsor pada wilayah yang rentan, khususnya apabila tidak diimbangi dengan sistem mitigasi dan kesiapsiagaan yang memadai (IPCC, 2022; Jakob, 2022).

Kesiapsiagaan bencana merupakan bagian penting dalam upaya pengurangan risiko bencana karena berkaitan dengan kemampuan masyarakat dan lembaga lokal dalam mengenali ancaman, menerima informasi peringatan dini, menentukan tindakan

penyelamatan diri, serta melakukan koordinasi sebelum, saat, dan setelah bencana terjadi. Kesiapsiagaan tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan individu, tetapi juga mencakup kesiapan kelembagaan, prosedur tanggap darurat, ketersediaan sarana evakuasi, kapasitas komunikasi, dan keberlanjutan edukasi kebencanaan (Paton, 2019; Ryan et al., 2020). Purnomo et al. (2025) menunjukkan bahwa kesiapsiagaan masyarakat memerlukan sosialisasi bencana, latihan evakuasi, pelatihan kepemimpinan, sistem peringatan, dan simulasi yang dilakukan secara berkelanjutan.

Kabupaten Lombok Timur merupakan salah satu wilayah di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memiliki karakter wilayah yang beragam, mulai dari kawasan pesisir hingga kawasan pegunungan. Kecamatan Sembalun merupakan wilayah dataran tinggi yang memiliki aktivitas pertanian dan pariwisata serta berada di sekitar bentang alam Gunung Rinjani. Kondisi geografis tersebut memberikan potensi sosio-ekonomi, tetapi juga menimbulkan risiko terhadap bencana hidrometeorologi, termasuk tanah longsor. Kecamatan Sembalun memiliki data geografis, pemerintahan, penduduk, pertanian, pariwisata, transportasi, dan sosial ekonomi yang penting sebagai dasar perencanaan pembangunan wilayah (BPS Kabupaten Lombok Timur, 2024). Selain itu, Dokumen Kajian Risiko Bencana Provinsi NTB 2022–2026 menegaskan bahwa ancaman bencana di Nusa Tenggara Barat perlu ditangani melalui pendekatan pengurangan risiko yang melibatkan kapasitas daerah dan masyarakat (BPBD Provinsi NTB, 2024).

Dalam penanggulangan bencana pada tingkat desa, *Stakeholder* yang terlibat terdiri atas pemerintah desa, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), tokoh masyarakat, relawan, BPBD Kabupaten Lombok Timur, dan warga terdampak. Perangkat desa berperan dalam kebijakan, koordinasi, pendataan, penyediaan sumber daya, serta integrasi program kebencanaan dalam perencanaan desa. TSBD dan BPBD Kabupaten Lombok Timur berperan sebagai unsur operasional yang mendukung penyebaran informasi, pemantauan kondisi lapangan, evakuasi, dan pemberian bantuan awal ketika terjadi bencana. Sementara itu, warga terdampak merupakan kelompok yang memiliki pengalaman langsung terhadap risiko, sehingga pengetahuan lokal mereka penting dalam memahami titik rawan, hambatan evakuasi, serta kebutuhan masyarakat. Simanjuntak et al. (2025) menunjukkan bahwa keberadaan tim siaga desa dapat meningkatkan pengetahuan dan sikap masyarakat, tetapi efektivitasnya bergantung pada pelatihan, simulasi, dukungan alat, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Meskipun berbagai upaya kesiapsiagaan telah dilakukan melalui pembentukan TSBD dan koordinasi

dengan BPBD, pelaksanaannya di lapangan belum selalu berjalan optimal. Keterbatasan pelatihan berkala, minimnya simulasi evakuasi, serta koordinasi antar-*Stakeholder* pada saat kondisi darurat menjadi bagian yang perlu diperhatikan dalam kesiapsiagaan bencana. Kondisi tersebut penting dalam konteks Kecamatan Sembalun yang memiliki risiko tanah longsor serta aktivitas pertanian dan pariwisata, sehingga masyarakat dan wisatawan menjadi bagian dari lingkungan yang menghadapi risiko bencana. Penelitian mengenai kesiapsiagaan bencana menunjukkan bahwa pendekatan dalam pengurangan risiko tidak hanya menekankan pada pemetaan bahaya, tetapi juga memperhatikan kapasitas sosial, koordinasi antaraktor, partisipasi masyarakat, dan tata kelola bencana. Purnama et al. (2026) menekankan bahwa efektivitas mitigasi tanah longsor memerlukan desain kelembagaan yang jelas, forum koordinasi yang rutin, aturan kerja yang disepakati, dan transparansi antaraktor. Kharismawati (2023) juga menunjukkan bahwa mitigasi tanah longsor di wilayah perbukitan perlu memperhatikan kondisi fisik wilayah, curah hujan, kesadaran masyarakat, dan tindakan pemerintah dalam mengelola risiko.

Sejauh ini, kajian yang secara khusus mengevaluasi kesiapsiagaan bencana tanah longsor pada tingkat desa dengan melibatkan perspektif perangkat desa, TSBD, BPBD, dan warga terdampak secara bersamaan masih terbatas, khususnya di wilayah Sembalun. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengidentifikasi kesiapsiagaan perangkat desa, TSBD, dan warga terdampak terhadap bencana tanah longsor di Desa Sembalun Bumbung, mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat kesiapsiagaan *Stakeholder*, serta merumuskan rekomendasi peningkatan kesiapsiagaan berdasarkan kondisi lokal desa. Pendekatan penelitian dilakukan secara kualitatif melalui wawancara mendalam kepada *Stakeholder* yang terlibat langsung, sehingga informasi yang diperoleh tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga menggambarkan pengalaman, persepsi, dan kebutuhan nyata di lapangan (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022).

Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus analisis kesiapsiagaan tiga kelompok *Stakeholder* utama di tingkat desa, yaitu perangkat desa, TSBD, dan warga terdampak. Penelitian tidak hanya menggambarkan kesiapan secara umum, tetapi juga membandingkan peran, hambatan, dan kebutuhan masing-masing *Stakeholder* dalam konteks bencana tanah longsor di Desa Sembalun Bumbung. Hasil penelitian diharapkan menghasilkan suatu kajian yang dapat menjelaskan *Stakeholder* bencana tanah longsor yang ada di desa Sembalun Bumbung serta mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi *Stakeholder* tersebut.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian bertujuan memahami secara mendalam pengalaman, persepsi, peran, serta kesiapsiagaan *Stakeholder* dalam menghadapi bencana tanah longsor. Pendekatan ini sesuai digunakan untuk menggali makna, proses sosial, dan dinamika kelembagaan yang tidak dapat dijelaskan hanya melalui angka statistik (Creswell & Poth, 2018; Sugiyono, 2022). Desain deskriptif digunakan untuk menggambarkan kondisi kesiapsiagaan *Stakeholder* secara sistematis berdasarkan data yang diperoleh di lapangan.

Penelitian dilaksanakan di Desa Sembalun Bumbung, khususnya wilayah Pusuk Sembalun. Lokasi penelitian dipilih karena memiliki karakter wilayah perbukitan dan berada pada kawasan yang berpotensi mengalami ancaman tanah longsor, terutama pada musim hujan. Selain itu, keberadaan pemerintah desa, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur memungkinkan penelitian memperoleh informasi mengenai kesiapsiagaan dari berbagai sudut pandang *Stakeholder* yang terlibat dalam penanggulangan bencana tanah longsor.

Subjek penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan keterlibatan dan pengetahuan mereka terhadap bencana tanah longsor. Informan penelitian meliputi pemerintah Desa Sembalun Bumbung, TSBD Desa Sembalun Bumbung, warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur. Jumlah informan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian hingga mencapai titik jenuh, yaitu ketika informasi yang diperoleh telah berulang dan tidak ditemukan tema baru yang signifikan (Braun & Clarke, 2021).

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi lapangan, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan dengan menggunakan pedoman pertanyaan yang telah disiapkan, tetapi tetap memberikan ruang kepada informan untuk menjelaskan pengalaman, persepsi, peran, dan pandangannya secara terbuka mengenai kesiapsiagaan menghadapi bencana tanah longsor. Wawancara mendalam kemudian ditranskripsikan secara verbatim agar informasi yang disampaikan informan dapat terdokumentasi secara utuh (Moleong, 2017). Observasi lapangan dilakukan untuk mengamati kondisi lingkungan, akses jalan, lokasi rawan longsor, tanda peringatan, jalur evakuasi, titik kumpul, serta fasilitas pendukung kesiapsiagaan. Dokumentasi dilakukan dengan mengumpulkan dokumen desa, foto lokasi, data kejadian bencana, catatan kegiatan TSBD, data dari BPBD Kabupaten Lombok Timur, dan dokumen kebencanaan yang relevan.

Data yang diperoleh dari wawancara, observasi lapangan, dan dokumentasi diolah dengan mengacu pada model analisis data kualitatif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Pada tahap awal dilakukan editing untuk memeriksa kelengkapan, kejelasan, dan konsistensi data dari setiap sumber. Selanjutnya, data hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi direduksi melalui proses seleksi, pemfokusan, dan penyederhanaan sesuai dengan fokus penelitian mengenai kesiapsiagaan *Stakeholder* terhadap bencana tanah longsor. Data hasil observasi disusun dalam catatan lapangan (*field notes*) yang memuat kondisi lingkungan, akses jalan, lokasi rawan bencana, tanda peringatan, jalur evakuasi, titik kumpul, dan fasilitas pendukung kesiapsiagaan. Data dokumentasi diklasifikasikan berdasarkan jenisnya, meliputi dokumen desa, foto lokasi, data kejadian bencana, catatan kegiatan TSBD, data BPBD Kabupaten Lombok Timur, dan dokumen kebencanaan lainnya.

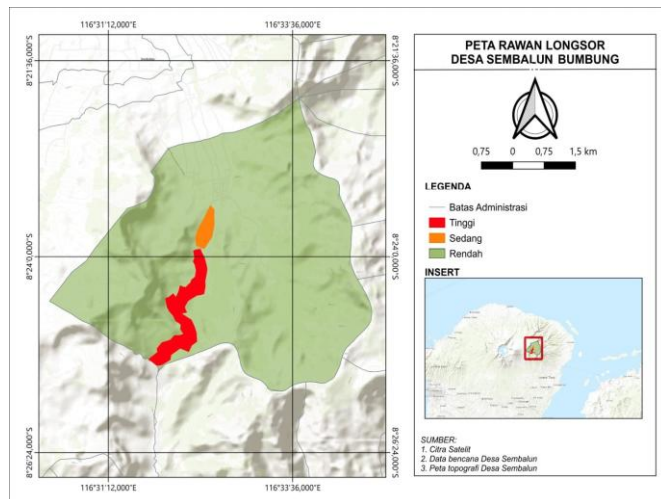
Data yang telah direduksi selanjutnya disajikan secara deskriptif dalam bentuk narasi, tabel, maupun gambar untuk memudahkan penggambaran kondisi kesiapsiagaan *Stakeholder*. Keabsahan data dilakukan melalui triangulasi sumber dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari perangkat desa, TSBD, warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur. Triangulasi sumber digunakan untuk menguji konsistensi informasi dari berbagai sumber sehingga data yang diperoleh memiliki tingkat validitas dan kepercayaan yang lebih tinggi (Denzin, 1978 dalam Moleong, 2017; Saldaña, 2021). Tahap akhir dilakukan melalui penarikan dan verifikasi kesimpulan dengan menginterpretasikan serta menghubungkan temuan yang diperoleh dari wawancara, observasi, dan dokumentasi berdasarkan fokus penelitian (Miles & Huberman, 1994).

Hasil dan Diskusi

Hasil penelitian diperoleh melalui wawancara dengan Pemerintah Desa Sembalun Bumbung, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur, yang diperkuat dengan hasil observasi lapangan dan dokumentasi. Data dianalisis menggunakan model interaktif Miles dan Huberman (1994) melalui reduksi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil analisis difokuskan pada aspek pengetahuan dan sikap, kebijakan dan kelembagaan, tanggap darurat dan simulasi, sistem peringatan dini, mobilisasi sumber daya, serta faktor pendukung, penghambat, dan rekomendasi peningkatan kesiapsiagaan.

Desa Sembalun Bumbung merupakan wilayah yang berulang kali menghadapi ancaman bencana tanah longsor, terutama pada musim hujan dengan intensitas

tinggi. Kejadian longsor umumnya terjadi di kawasan perbukitan dengan kemiringan lereng curam dan tutupan vegetasi yang minim, khususnya di sekitar jalur Pusuk Sembalun dan kawasan yang berbatasan dengan Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR). Peristiwa longsor di jalur Pusuk Sembalun yang sempat mengakibatkan sejumlah warga terjebak, sehingga mendorong pemerintah desa, TSBD, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur untuk lebih waspada terhadap potensi longsor susulan di titik-titik rawan lainnya.



Gambar 1. Peta rawan longsor

Kondisi kerawanan tersebut bisa di lihat pada data spasial berupa peta rawan longsor Desa Sembalun Bumbung yang menggambarkan sebaran wilayah dengan tingkat kerawanan tinggi, sedang, dan rendah,

sebagaimana disajikan pada Gambar 1. Peta ini menunjukkan bahwa zona kerawanan tinggi terkonsentrasi pada bagian barat daya desa, yang beririsan dengan area perbukitan dan jalur yang selama ini dikenal warga sebagai titik longsor.

Secara umum, hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa, TSBD, warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur telah memiliki bentuk kesiapsiagaan dan peran masing-masing dalam menghadapi bencana tanah longsor. Kesiapsiagaan didukung oleh keberadaan kelembagaan TSBD, pelatihan dan simulasi, ketersediaan peralatan, serta koordinasi antar *Stakeholder*. Namun, masih ditemukan beberapa kendala, terutama keterbatasan pelatihan dan anggaran, jumlah relawan, sarana transportasi, gangguan komunikasi, serta minimnya penerangan dan sarana peringatan dini fisik di lokasi rawan. Perbandingan kesiapsiagaan masing-masing *Stakeholder* disajikan pada Tabel 1.

Berdasarkan matriks kesiapsiagaan pada Tabel 1, dilakukan penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh mengenai kondisi kesiapsiagaan *Stakeholder* di Desa Sembalun Bumbung. Tahap ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara antar *Stakeholder*, observasi lapangan, dan dokumentasi untuk melihat kesesuaian temuan, mengidentifikasi faktor yang memengaruhi kesiapsiagaan, serta merumuskan rekomendasi yang sesuai dengan kondisi lokal desa. Hasil penarikan kesimpulan dan verifikasi tersebut disajikan berdasarkan tingkat kesiapsiagaan *Stakeholder*, faktor pendukung dan penghambat, serta rekomendasi peningkatan kesiapsiagaan.

Tabel 1: Matriks Kesiapsiagaan *Stakeholder* terhadap Bencana Tanah Longsor di Desa Sembalun Bumbung

Aspek	Pemerintah Desa	TSBD	Warga Terdampak	BPBD Kab. Lombok Timur
Pengetahuan & Sikap	Longsor dipicu hujan berkepanjangan, kemiringan lereng, dan minimnya vegetasi; area rawan: Pusuk Sembalun & kawasan TNGR; sikap: siaga dan aktif memantau.	Memahami tanda longsor (hujan lama, tanah jenuh) melalui rambu lapangan; anggota telah dibekali pelatihan BPBD, BASARNAS, dan BMKG.	Memahami penyebab longsor; sebagian warga pernah mengalami langsung, termasuk peristiwa terjebak di Pusuk Sembalun.	Memiliki kajian risiko bencana wilayah dalam bentuk buku kajian kebencanaan daerah sebagai dasar kebijakan.
Kebijakan & Kelembagaan	Memiliki SK pengesahan TSBD dan SK penanganan/penanggulangan bencana; mendukung TSBD melalui anggaran APBDes dan penyediaan alat operasional.	Dibentuk resmi sejak 2010 (inisiasi Oxfam, disahkan desa); memiliki pembagian tugas per divisi dan SOP penanganan longsor.	Tidak memiliki kelembagaan formal, namun terlibat sebagai relawan terdampak dan turut membantu pelaporan lokasi kejadian.	Menjalankan program monitoring TSBD, pembinaan, dan aspirasi masyarakat sebagai bagian

Aspek	Pemerintah Desa	TSBD	Warga Terdampak	BPBD Kab. Lombok Timur
Tanggap Darurat & Simulasi	Melakukan penanaman pohon di titik rawan; pembagian tugas antara pemerintah desa dan TSBD; pernah mengikuti pelatihan dan simulasi evakuasi bersama BPBD.	Memiliki SOP dan pembagian tugas per divisi saat darurat; pernah melaksanakan simulasi/gladi evakuasi, termasuk lintas desa.	Menghindari area tebing saat hujan, segera menuju tempat aman (lapangan/masjid) sambil menunggu bantuan TSBD.	dari kebijakan kabupaten. Membina TSBD melalui simulasi dan pelatihan rutin; menyusun rencana kontinjensi berbasis kajian titik rawan.
Sistem Peringatan Dini	Peringatan disampaikan melalui media sosial dan imbauan kewaspadaan; belum memiliki sarana peringatan dini formal.	Memantau kemiringan lereng, vegetasi, dan curah hujan; menyampaikan peringatan melalui kentongan dan pengeras suara.	Menerima informasi melalui pengeras suara, kentongan, dan media sosial; dinilai cukup jelas dan tepat waktu.	Menyediakan data prakiraan cuaca BMKG dan alat ombrometer yang diteruskan ke TSBD dan masyarakat.
Mobilisasi Sumber Daya	Menyediakan peralatan operasional dan penanggulangan; menerima dukungan pelatihan dan alat dari kabupaten/BPBD.	Memiliki logistik cukup lengkap (baju hujan, tenda, tandu, sekop, ekskavator, dll.); jumlah relawan per dusun masih terbatas.	Berperan sebagai relawan pendukung saat kejadian, tanpa sumber daya logistik tersendiri.	Memberikan dukungan peralatan dan kebutuhan kebencanaan kepada desa, meski anggaran pelatihan masih minim.
Faktor Pendukung	Kelengkapan alat, dukungan ekskavator, dan kesiapan TSBD.	Ketersediaan alat, kesiapan anggota, dan pelatihan rutin dari berbagai instansi.	Adanya peringatan dini dan simulasi kebencanaan yang pernah diikuti.	Forum kebencanaan yang baik dan dokumen kebencanaan yang lengkap.
Faktor Penghambat	Sulit mengumpulkan anggota, sinyal komunikasi lemah, dan keterbatasan transportasi.	Keterbatasan transportasi dan relawan, sinyal hilang di area longsor, serta minimnya penerangan jalan.	Penanganan relatif lambat akibat gangguan sinyal dan minimnya penerangan jalan.	Keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala.
Rekomendasi	Evaluasi kesiapsiagaan masyarakat, penghijauan, dan peningkatan pelatihan/simulasi.	Peningkatan frekuensi pelatihan dan penambahan anggaran kebencanaan.	Pelatihan berkala, sosialisasi kebencanaan, dan penguatan kapasitas TSBD.	Penyusunan Perdes kebencanaan dan kebijakan anggaran desa untuk pelatihan serta simulasi.

Tingkat Kesiapsiagaan *Stakeholder*

Secara umum, kesiapsiagaan *Stakeholder* di Desa Sembalun Bumbung menunjukkan pola yang lebih kuat pada aspek respons/penanganan dibandingkan aspek

pencegahan dan mitigasi. Pemerintah desa dan TSBD telah memiliki dasar kelembagaan yang jelas berupa SK, SOP, dan pembagian tugas, didukung oleh peralatan/logistik yang relatif lengkap serta koordinasi

rutin melalui grup komunikasi bersama BPBD. Warga terdampak juga telah memiliki kesadaran dasar mengenai jalur evakuasi dan titik kumpul. Kondisi tersebut sejalan dengan pandangan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya mencakup pengetahuan masyarakat, tetapi juga kesiapan kelembagaan, prosedur tanggap darurat, sistem komunikasi, dan sarana pendukung (Paton, 2019; Ryan et al., 2020). Namun demikian, sistem peringatan dini formal berupa alat fisik seperti sirine belum tersedia, pelatihan dan sosialisasi kebencanaan masih jarang dilakukan secara rutin, dan upaya pencegahan seperti penghijauan belum berjalan optimal. Temuan ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan di tingkat desa masih perlu diperkuat melalui pelatihan, simulasi, sistem peringatan, dan edukasi kebencanaan yang dilakukan secara berkelanjutan, sebagaimana dikemukakan Purnomo et al. (2025).

Faktor Pendukung dan Penghambat

Hasil triangulasi antarsumber, yaitu Pemerintah Desa, TSBD, warga terdampak, BPBD, serta observasi lapangan, menunjukkan adanya sejumlah faktor yang mendukung dan menghambat kesiapsiagaan *Stakeholder*. Faktor pendukung yang konsisten ditemukan meliputi kelengkapan peralatan dan logistik kebencanaan, kelembagaan TSBD yang telah memiliki SOP dan pembagian tugas yang jelas, koordinasi rutin antar-*Stakeholder*, serta dukungan pelatihan dari BPBD, BASARNAS, dan BMKG. Keberadaan kelembagaan, pelatihan, simulasi, dukungan peralatan, dan koordinasi merupakan unsur yang penting dalam membangun kapasitas kesiapsiagaan masyarakat. Hal ini sejalan dengan temuan Simanjuntak et al. (2025) bahwa efektivitas tim siaga desa dipengaruhi oleh pelatihan, simulasi, dukungan peralatan, dan koordinasi yang berkelanjutan.

Di sisi lain, faktor penghambat yang ditemukan meliputi minimnya sarana peringatan dini formal, gangguan sinyal komunikasi di kawasan rawan, khususnya Pusuk Sembalun, ketiadaan penerangan jalan di titik rawan, keterbatasan jumlah relawan dan alat transportasi, serta keterbatasan anggaran untuk pelatihan dan simulasi kebencanaan secara berkala. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kesiapsiagaan tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan kelembagaan, tetapi juga oleh dukungan sumber daya, komunikasi, dan keberlanjutan kegiatan kesiapsiagaan. Purnama et al. (2026) menekankan pentingnya desain kelembagaan yang jelas, forum koordinasi yang rutin, aturan kerja yang disepakati, dan transparansi antaraktor dalam mendukung efektivitas mitigasi tanah longsor. Selain itu, Kharismawati (2023) menunjukkan bahwa mitigasi tanah longsor di wilayah perbukitan perlu memperhatikan kondisi fisik wilayah, curah hujan,

kesadaran masyarakat, dan tindakan pemerintah dalam mengelola risiko.

Kesesuaian temuan dari keempat informan dan hasil observasi lapangan terhadap isu penerangan jalan, gangguan sinyal, dan minimnya sarana peringatan dini formal memperkuat validitas data melalui proses triangulasi sumber sebagaimana dikemukakan oleh Denzin (1978) dalam Moleong (2017).

Rekomendasi Peningkatan Kesiapsiagaan

Berdasarkan hasil reduksi, penyajian, dan verifikasi data, rekomendasi peningkatan kesiapsiagaan di Desa Sembalun Bumbung diarahkan pada penguatan aspek kelembagaan, sumber daya, sistem peringatan dini, serta kapasitas masyarakat. Rekomendasi tersebut meliputi penyusunan Peraturan Desa (Perdes) tentang kebencanaan sebagai payung kebijakan bagi operasional TSBD, pengalokasian anggaran desa untuk pelatihan dan simulasi secara berkala, penyediaan sarana peringatan dini fisik dan penerangan jalan di titik rawan, penguatan program penghijauan pada lereng rawan longsor, peningkatan sosialisasi dan edukasi kebencanaan kepada masyarakat, serta penambahan jumlah dan kapasitas relawan TSBD. Arah rekomendasi tersebut sejalan dengan Purnomo et al. (2025) yang menekankan pentingnya sosialisasi, latihan evakuasi, sistem peringatan, dan simulasi secara berkelanjutan serta Simanjuntak et al. (2025) yang menunjukkan pentingnya pelatihan, simulasi, dukungan alat, dan koordinasi dalam meningkatkan efektivitas tim siaga desa.

Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa kesiapsiagaan *Stakeholder* terhadap bencana tanah longsor tanah longsor di Desa Sembalun Bumbung telah berjalan cukup baik pada aspek kelembagaan dan respons darurat, tetapi masih memerlukan penguatan pada aspek pencegahan, sistem peringatan dini formal, serta dukungan anggaran dan sarana pendukung. Temuan ini menjadi dasar bagi penyusunan rekomendasi penguatan kapasitas kesiapsiagaan bencana yang lebih efektif dan berkelanjutan di Desa Sembalun Bumbung, Kecamatan Sembalun, Kabupaten Lombok Timur.

Ucapan Terimakasih

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Pemerintah Desa Sembalun Bumbung, Tim Siaga Bencana Desa (TSBD), warga terdampak, dan BPBD Kabupaten Lombok Timur yang telah memberikan informasi, dukungan, dan kesempatan selama proses penelitian.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu pelaksanaan penelitian ini hingga selesai.

Referensi

- Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat (BPBD). (2024). Dokumen kajian risiko bencana Provinsi Nusa Tenggara Barat 2022–2026.
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Lombok Timur (BPS). (2024). Kecamatan Sembalun dalam angka 2024.
- Braun, V., & Clarke, V. (2021). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Intergovernmental Panel on Climate Change. (2022). *Climate change 2022: Impacts, adaptation and vulnerability*. Cambridge University Press.
- Jakob, M. (2022). Landslides in a changing climate. In J. F. Shroder, T. Davies, & N. Rosser (Eds.), *Landslide hazards, risks, and disasters* (2nd ed., pp. 505–579). Elsevier.
- Kharismawati, S. A. (2023). Landslide disaster mitigation management in Remo Village Paramasan District. *International Conference on Social Science Education Proceeding*, 1, 333–339. Jurusan Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Lambung Mangkurat.
- McColl, S. T. (2022). Landslide causes and triggers. In J. F. Shroder, T. Davies, & N. Rosser (Eds.), *Landslide hazards, risks, and disasters* (2nd ed., pp. 13–41). Elsevier.
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Paton, D. (2019). Disaster risk reduction: Psychological perspectives on preparedness. *Australian Journal of Psychology*, 71(4), 327–341.
- Purnama, T. H., Putera, R. E., & Koeswara, H. (2026). Institutional design of collaborative governance in landslide disaster mitigation: A case study of Sawahlunto City Indonesia. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 12(1), 127–141.
- Purnomo, E., Hamid, A. Y. S., Gayatri, D., & Setiawan, A. (2025). Challenges and needs in disaster preparedness: A qualitative study. *Salud, Ciencia y Tecnologia*, 5, 1225.
- Ryan, B., Johnston, K. A., Taylor, M., & McAndrew, R. (2020). Community engagement for disaster preparedness: A systematic literature review. *International Journal of Disaster Risk Reduction*, 49, 101655.
- Saldaña, J. (2021). *The coding manual for qualitative researchers* (4th ed.). SAGE Publications.
- Simanjuntak, B., Ketaren, O., Tarigan, F., Manurung, K., & Sinaga, J. (2025). Analysis of community preparedness in facing disasters following the establishment of village disaster preparedness teams in Situmeang Hasundutan Village, North Tapanuli Regency. *Open Access Health Scientific Journal*, 6(1), 160–165.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.